



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179);
18. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 218);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 yang dianggarkan dalam Program dan Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI MALUKU TENGAH, *uf*

*Tuasikal Abua*  
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH, *k*

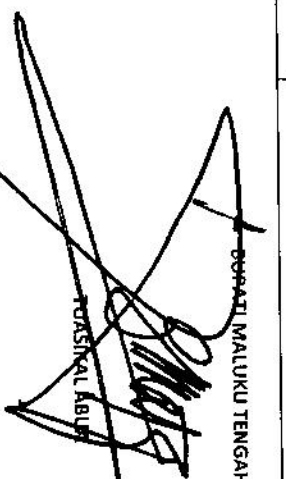
*Umarella Ibrahim*  
UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2016 NOMOR 246

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : 23 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 25 Mei 2016**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016**

SKPD	Kode Rekening	SEBELUM PERUBAHAN		URAIAN		SETELAH PERUBAHAN	
		Jumlah (Rp)	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)		
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1. 01. 1. 01. 01. 05. 01.		1. 01. 1. 01. 01. 05. 01.	Belanja Tidak Langsung	212.078.882.000		
	1. 01. 1. 01. 01. 05. 01. 5. 1. 1. 02. 06.	151.970.786.000	1. 01. 1. 01. 01. 05. 01. 5. 1. 1. 02. 06.	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah	212.078.882.000		
Dinas Kesehatan	1. 01. 1. 01. 01. 15. 69.		1. 01. 1. 01. 01. 15. 69.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia	22.800.000		
	1. 01. 1. 01. 01. 15. 69. 5. 2. 2. 28. 02.		1. 01. 1. 01. 01. 15. 69. 5. 2. 2. 28. 02.	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	22.800.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28.	Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK Kesehatan )	11.088.000.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 1. 01. 01.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	199.800.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 01. 01.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.027.500		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 01.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	720.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 02.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	10.807.500		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 03.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 06. 03.	Belanja Dokumentasi	500.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 07. 02.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 07. 02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor Tempat	3.000.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 10. 07.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 10. 07.	Belanja Sewa Sound System	4.000.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 11. 05.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 11. 05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.520.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 15. 01.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	355.900.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 15. 02.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perlengkapan Dinas Daerah	47.205.000		
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 26. 01.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 26. 01.	Jasa Tenaga Ahli/Parasumber/Instruktur	12.000.000		
1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 26. 02.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 26. 02.	Moderator	4.800.000			
1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 28. 01.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 28. 01.	Belanja Operasional Kesehatan	10.402.720.000			
1. 02. 1. 02. 01. 16. 29.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 29.	Jaminan Peralihan ( Bantuan Operasional Kesehatan - DAK Non Fisik )	2.877.317.000			
1. 02. 1. 02. 01. 16. 29. 5. 2. 2. 28. 01.		1. 02. 1. 02. 01. 16. 29. 5. 2. 2. 28. 01.	Belanja Operasional Kesehatan	2.877.317.000			
RSUD Masohi	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14.		1. 02. 1. 02. 02. 23. 14.	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK Non Fisik )	521.420.000		
	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 01. 01.		1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.435.000		
	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 06. 01.		1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	4.875.000		
	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 06. 02.		1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	9.750.000		
	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 11. 02.		1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 11. 02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.900.000		
	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 15. 02.		1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perlengkapan Dinas Luar Daerah	287.760.000		
	1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 17. 03.		1. 02. 1. 02. 02. 23. 14. 5. 2. 2. 17. 03.	Belanja Bimbingan Teknis	156.700.000		
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 16.		1. 12. 1. 12. 01. 15. 16.	Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (BOKB)	61.920.000		
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 05. 03.		1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 05. 03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21.919.800		
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 15. 01.		1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perlengkapan Dinas Dalam Daerah	40.000.200		
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1. 12. 1. 12. 01. 15. 16.		1. 12. 1. 12. 01. 15. 16.	Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (BOKB)	61.920.000		
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 05. 03.		1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 05. 03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21.919.800		
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 15. 01.		1. 12. 1. 12. 01. 15. 16. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perlengkapan Dinas Dalam Daerah	40.000.200		

SKPD	Kode Rekening	SEBELUM PERUBAHAN		URAIAN		Kode Rekening	Jumlah (Rp)	SETELAH PERUBAHAN		URAIAN	Jumlah (Rp)
		Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)						
Badan Keluarga Berencana dan Pembudayaan Perencanaan Daerah	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17.	Baya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB)	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17.	-	Baya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BOKB)	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17.	360.000.000		
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 01.	-	Belanja Alat Tulis Kantor	8.180.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 04.	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 04.	-	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	225.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 01. 05.	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	7.280.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 02.	Belanja Air	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 02.	-	Belanja Air	20.000.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 03.	Belanja Listrik	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 03.	-	Belanja Listrik	26.400.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 16.	Jasa Kebersihan Kantor	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 03. 16.	-	Jasa Kebersihan Kantor	21.600.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 06. 01.	-	Belanja Cetak	19.200.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Pengandaan	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 06. 02.	-	Belanja Pengandaan	7.515.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 11. 05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 11. 05.	-	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.400.000				
	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	1. 12. 1. 12. 01. 15. 17. 5. 2. 2. 15. 01.	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223.200.000				
		PENDAPATAN	151.970.786.000				PENDAPATAN	229.435.539.000			
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	2.448.000.000			
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 02.	Bantuan Operasional Kesehatan	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 02.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 02.	Bantuan Operasional Kesehatan	11.088.000.000			
	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 03.	Akreditasi Rumah Sakit	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 03.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 03.	Akreditasi Rumah Sakit	521.420.000			
0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 05.	Jarungan Persalinan	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 05.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 05.	Jarungan Persalinan	2.877.317.000				
0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 06.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 06.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 06.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	421.920.000				
0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 07.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 07.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 07.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	200.070.582.000				
0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 08.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 08.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 3. 04. 08.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	12.008.300.000				
0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 3. 4. 01. 01.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	142.361.786.000	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 3. 4. 01. 01.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 3. 4. 01. 01.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	-				
0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 4. 01. 02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	9.609.000.000	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 4. 01. 02.	-	0. 00. 0. 00. 00. 00. 04. 4. 2. 4. 01. 02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-				
0. 00. 0. 00. 05. 01. 04.	Belanja Hibah	-	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04.	-	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04.	Belanja Hibah	2.425.200.000				
0. 00. 0. 00. 05. 01. 04. 5. 1. 4. 08. 01.	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	-	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04. 5. 1. 4. 08. 01.	-	0. 00. 0. 00. 05. 01. 04. 5. 1. 4. 08. 01.	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	2.425.200.000				

  
 KEPALA MALUKU TENGAH  
 ROSNIAL ABU